



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019

PROVINSI BENGKULU

RABU, 04 SEPTEMBER 2019

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERISAAN PERHATIAN KHUSUS

Temuan Rp1,052 M Dikembalikan

BENGKULU - Sekretaris Inspektorat Provinsi Bengkulu Henny Kauri mengatakan, temuan potensi kerugian negara senilai Rp 1,052 miliar pada dana reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2017 sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi LHP BPK.
Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, sudah mengembalikan potensi kerugian Rp 1,052 miliar ke kas daerah.



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERISAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Temuan Rp1,052 M Dikembalikan

Sambungan dari halaman 1

"Itu temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sudah ditindaklanjuti dan juga telah sesuai dengan rekomendasi. Sudah menyeter ke kas daerah sampai dengan jangka waktu 28 Mei 2018," kata Henny.

Untuk pengembalian, terang Henny, OPD terkait langsung menyeter ke kas daerah sesuai dengan nilai temuan tersebut. Inspektorat juga sudah menerima bukti setoran, termasuk sudah diserahkan ke BPK. "Bukti setoran ke kas daerah juga sudah ada," bebarnya.

Pengamat Hukum Pidana Unihaz, Sapuan Dani, SH, MH mengatakan walaupun kerugian negara sudah dikembalikan tentunya tidak membuat proses hukum berhenti. Uang hasil temuan yang sudah dikembalikan itu bisa menjadi bukti oleh para penyidik. Bukti yang dimaksud adalah memang benar terjadinya tindak pidana melawan hukum yakni indikasi korupsi.

"Ya tetap berlanjut, uang yang dikembalikan itu bisa dijadikan bukti oleh para penyidik bahwa memang benar adanya indikasi korupsi disana," pungkasnya.

Seperti diketahui, penelusuran tim Investigasi Harian Rakyat Bengkulu menemukan ada indikasi potensi kerugian negara 1,05 miliar dari kegiatan reses yang dilakukan di Sekretariat DPRD. Kegiatan reses anggota DPRD ini dilakukan selama tiga kali dalam setahun. Awalnya pada 3-7 April 2017 kemudian 21-25 Agustus 2017 dan 2-6 Oktober.

Kegiatan reses anggota DPRD ini dilakukan selama tiga kali dalam setahun. Awalnya pada 3 sampai dengan 7 April 2017 kegiatan tersebut dinaungi dengan SK DPRD Nomor 13/KPTS/DPRD-1/2017 21 Maret 2017. Kemudian 21 sampai 25 Agustus 2017 dengan SK/KPTS/DPRD-1/2017 16 Agustus 2017 dan terakhir 2 sampai dengan 6 Oktober dengan Nomor 27/KPTS/PIMP/DPRD-1/2017 26 September 2017.

Ada sebanyak 556 bukti pembayaran transport peserta reses. Sebanyak 555 bukti menunjukkan jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan reses setiap anggota DPRD sejumlah 500 orang per periode. Hanya satu bukti yang menunjukkan jumlah peserta yang kurang dari 500 orang yakni sebanyak 483 orang. Dari 556 bukti tersebut, sebanyak 526 bukti menunjukkan bahwa jumlah peserta dari setiap titik tujuan reses adalah 100 orang dan 30 bukti yang menunjukkan jumlah peserta yang bervariasi antara 150 sampai dengan 483.

Selain biaya transportasi peserta, di setiap lokasi reses terdapat biaya lain yang dikeluarkan. Yaitu biaya sewa tempat, sewa kursi dan sewa soundsystem. Dari total 527 bukti sewa tempat, sejumlah 524 bukti menunjukkan bahwa biaya sewa dibebankan ke desa dan tiga bukti ke pihak bukan desa. Dari total 525 bukti sewa meja kursi sebanyak 522 bukti dibebankan ke desa dan 3 bukti ke pihak bukan desa. Dari total 516 bukti sewa soundsystem, sejumlah 513 dibebankan ke desa dan sisanya sebanyak 3 bukti ke pihak bukan desa.

Selanjutnya pemeriksa melakukan

konfirmasi di 289 titik tujuan reses yang terdapat dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj). "Berdasarkan konfirmasi tersebut terdapat indikasi penggelembungan jumlah peserta reses dan biaya sewa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," bunyi hasil LHP BPK.

Atas hal tersebut pemeriksa BPK meminta keterangan kepada pendamping reses sebagai pihak yang membuat SPj. Pendamping reses yang membuat SPj reses mengakui memang jumlah peserta reses tidak mencapai jumlah total 500 orang seperti dalam SPj. "Pendamping menjelaskan bahwa penambahan jumlah peserta kegiatan sehingga mencapai 500 orang adalah karena digunakan untuk membayar keperluan lainnya di luar dana reses," kata sumber RB.

Seperti baiya sumbangan ke warga, pemberian ke petugas keamanan dan panitia acara. Pendamping juga menjelaskan pelaksanaan reses di dua sampai dengan lima titik tujuan reses yang digabung di satu tempat. Tetapi dalam SPj disebutkan bahwa pelaksanaan di masing-masing titik tujuan reses. Selain itu terdapat biaya sewa tempat meja/kursi dan soundsystem yang nilainya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya." Dengan demikian, atas dasar kondisi tersebut di atas, terdapat indikasi realisasi biaya kegiatan reses yang tidak sesuai dengan kondisi atas pembayaran uang transport peserta dan biaya sewa tempat, sewa kursi dan sewa soundsystem sebesar Rp 1,052 miliar yang terindikasi merugikan keuangan daerah," bunyi dokumen LHP BPK yang diperoleh RB. (zie/cup)